

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang berhubungan dengan pendidikan, terutama guru masih menjadi topik menarik untuk didiskusikan dan tak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Dikatakan menarik, karena guru merupakan komponen strategis dan terdepan dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat dijadikan sebagai indikator penentu apakah suatu pembelajaran yang dilaksanakan berkualitas atau tidak. Apabila mutu guru tinggi maka proses pembelajaran yang dilaksanakan juga akan baik.

Berbagai ikhtiar yang telah dan sedang dilakukan pemerintah sampai saat ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui upaya penyempurnaan kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana belajar, meningkatkan jumlah anggaran pendidikan, rekrutmen guru dan peningkatan profesionalisme dalam bentuk seminar, pelatihan, *workshop*, terbukanya peluang untuk mengikuti pendidikan pada jenjang S2 dan S3 serta program sertifikasi guru.

Tidak sampai di situ saja, program pembinaan bagi semua guru telah pula dilakukan pemerintah melalui dinas terkait yang dimaksudkan untuk meningkatkan *soft skill* dan kedisiplinan guru. Misalnya, program bimbingan teknis dan bimbingan mental yang diselenggarakan sekolah dengan supervisi dari dinas pendidikan telah berlangsung sampai saat ini. Sebab betapa pun hebatnya penyempurnaan kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana belajar yang serba canggih, peningkatan jumlah anggaran pendidikan yang besar, rekrutmen guru

dan peningkatan profesionalisme dalam bentuk seminar, pelatihan, *workshop*, terbukanya peluang untuk mengikuti pendidikan pada jenjang S2 dan S3 serta program sertifikasi guru belum berarti apa-apa apabila tidak diimbangi dengan peningkatan *soft skill* dan kedisiplinan guru.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa kedisiplinan guru sangat penting untuk menghasilkan sistem pembelajaran yang berkualitas. Begitu pentingnya aspek kedisiplinan ini, Nicholas Odoyo Simba, John Odwar Agak & Eric K. Kabuka, menyatakan sebagai berikut:

“Researchers appreciate that discipline is an important component of human behavior and assert that without it an organization cannot function well towards the achievement of its goals (Ouma, Simatwa, & Serem, 2013). In the context of a school system, a disciplined student is that student whose behaviours, actions and inactions conform to the predetermined rules and regulations of the school (Ali, Dada, Isiaka, & Salmon, 2014).”

Implikasi yang dapat ditarik dari pernyataan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab guru terhadap bidang tugasnya, termasuk aspek kedisiplinannya. Upaya-upaya yang terkait dengan peningkatan kedisiplinan guru harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kualitas pembelajaran maupun kualitas pendidikan nasional yang baik pula. Tujuan itu dapat tercapai dengan baik mengingat peran dan tugas guru dalam pembelajaran sangat strategis, dan mungkin tidak tergantikan oleh apa dan siapa pun. Karena itulah, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan

kedisiplinan guru menjadi sebuah keniscayaan dan kewajiban bersama yang harus dilakukan.

Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan peran strategis guru di sekolah sebagaimana dirangkum dalam Mulyasa (2008) sebagai berikut:

1. Murphy (1992), menyatakan bahwa keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus pusat inisiatif pembelajaran. Karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan diri secara mandiri serta tidak bergantung pada inisiatif kepala sekolah dan supervisor.
2. Brand (dalam Educational Leadership, 1993), mengatakan bahwa hampir semua usaha reformasi pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode pembelajaran, semua bergantung kepada guru. Tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran, serta tanpa dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.
3. Cheng dan Wong (1996), berdasarkan hasil penelitiannya di Zhejiang, Cina: melaporkan empat karakteristik sekolah dasar yang unggul (berprestasi), yaitu: (a) adanya dukungan yang konsisten dari masyarakat, (b) tingginya derajat profesionalisme di kalangan guru, (c) adanya tradisi jaminan kualitas atau quality assurance dari sekolah, dan (d) adanya harapan yang tinggi dari siswa untuk berprestasi.
4. Supriadi (1998: 178), mengungkapkan bahwa mutu pendidikan yang dinilai dari prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh guru, yaitu 34% pada negara-negara berkembang, dan 36% pada negara industri.

5. Jalal dan Mustafa (2001), menyimpulkan bahwa komponen guru sangat mempengaruhi kualitas pengajaran melalui: (a) penyediaan waktu yang lebih banyak pada siswa, (b) interaksi dengan siswa dengan frekuensi yang lebih intens atau sering, (c) tingginya tanggung jawab mengajar dari guru. Karena itu, baik buruknya suatu sekolah sangat bergantung pada peran dan fungsi guru.

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumen yang dilakukan tanggal 8, 9 & 10 Mei 2017 di SMK sub rayon 06 di Kota Medan, ditemukan delapan kebiasaan yang sering dilakukan yang menunjukkan lemahnya kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran, yaitu: (1) Kehadiran di sekolah yang selalu tidak tepat waktu, termasuk pada jam mengajar di kelas. (2) Rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran. (3) Tanggungjawab yang diberikan kepada guru belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, misalnya kelengkapan perangkat pembelajaran seperti RPP dan silabus yang kebanyakan masih mengganti tahun ajaran tanpa melakukan revisi yang mendalam, misalnya analisis terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa, kesesuaian metode, media dan evaluasi yang digunakan. (4) Kurangnya keterampilan dalam mengelola kelas. Secara umum banyak masih ditemukan proses pembelajaran berlangsung di bawah kontrol dan pembinaan guru secara ketat. (5) Rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*). (6) Rendahnya keinginan untuk motivasi berprestasi. (7) Rendahnya komitmen profesi, dan (8) Rendahnya kemampuan dalam manajemen waktu.

Secara umum terdapat beberapa implikasi yang ditimbulkan akibat lemahnya kedisiplinan guru adalah tidak kondusifnya proses pembelajaran di sekolah. Hal-hal yang terjadi di sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengecekan kehadiran siswa di sekolah sangat jarang, akibatnya suasana kelas menjadi tidak terkendali dan berlangsung dalam suasana gaduh. Kemungkinan hal ini akan mengganggu kelas-kelas lain yang ada di sekitarnya dan konsentrasi siswa dalam belajar menjadi tidak utuh.
2. Kehadiran guru di sekolah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembelajaran masih sebatas rutinitas belaka. Artinya, masih banyak guru yang mengajar tidak sepenuh hati; proses pembelajaran dilaksanakan secara normatif tanpa mau memikirkan bagaimana meningkatkan prestasi dan kemampuan siswa. Targetnya adalah memberikan materi pelajaran sebanyak-banyaknya (tuntas materi/silabus), akan tetapi mengabaikan membekali kompetensi apa yang dapat dikuasai siswa dari suatu materi pelajaran tertentu (tuntas kompetensi).
3. Motivasi mengajar yang dimiliki guru sangat rendah, hal ini dapat terlihat dari kemampuan mereka dalam hal penguasaan materi karena terbatasnya sumber-sumber bacaan yang dimiliki guru. Penguasaan materi yang terbatas juga dilatarbelakangi rendahnya minat membaca. Dengan demikian, apa yang diberikan/diajarkan guru kepada siswa praktis hanya bersumber pada satu buku pegangan yang ada saja.
4. Pengelolaan kelas sampai sejauh ini masih belum banyak dilakukan guru. Pengelolaan kelas dapat berbentuk pengaturan ruangan yang fleksibel agar siswa dapat belajar dengan nyaman, menghindari kelas yang monoton, serta dapat memecahkan kebekuan suasana pembelajaran. Pada akhirnya kondisi pengaturan kelas ini akan meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan.

5. Pengelolaan proses pembelajaran juga belum dilakukan secara sungguh-sungguh, misalnya bagaimana membuka, menutup, sampai melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran belum optimal dilakukan guru. Akibatnya, siswa menjadi kurang termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan proses pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dilakukan guru.

Beberapa kenyataan di atas merupakan indikasi dari rendahnya disiplin guru dalam mengajar. Rendahnya disiplin guru tersebut menyebabkan suasana kelas menjadi tidak kondusif, dan kemungkinan akan berdampak secara luas di antaranya adalah rendahnya kualitas pendidikan nasional. Karena masalah rendahnya disiplin guru terjadi secara nasional pula. Memang harus diakui bahwa mutu pendidikan nasional hingga saat ini kurang memiliki daya saing (*competitiveness*) apalagi daya beda (*comparativeness*). Karena itu, banyak orang yang menuding bahwa kualitas pendidikan nasional sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Secara empirik, implikasi dari rendahnya disiplin guru terlihat dari capaian hasil Ujian Nasional (UN) dalam beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Puspendik Balitbang-Kemdikbud tahun 2014 menyatakan bahwa rata-rata nilai kompetensi siswa di Kota Medan tahun pelajaran 2013/2014 dengan perolehan skor **8,09** lebih rendah dari kota Tebing Tinggi (skor 8,40), Sibolga (skor 8,33), Humbang Hasundutan (skor 8,44), Pakpak Barat (skor **8,30**), Asahan (skor 8,33) dan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara. Perolehan skor nilai kompetensi kota Medan 8,09 relatif seimbang dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan skor 8,08., Gunung Sitoli **8,07**. Akan

tetapi peroleh nilai kompetensi siswa di kota Medan ini lebih tinggi dari Kabupaten Deli Serdang (7,68), Nias Utara (8,00), dan Nias Selatan (8,06) dan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya (Dokumen CD Puspendik Balitbang-Kemdikbud tahun 2014).

Masih rendahnya hasil UN yang diperoleh siswa SMK sudah pasti disebabkan oleh minimnya penguasaan materi soal yang di UN-kan. Penguasaan materi yang rendah disebabkan kegagalan guru dalam merencanakan pembelajaran. Perolehan nilai ujian nasional SMK di kota Medan tingkat kota/kabupaten adalah 65,378., tingkat provinsi 65,279., sedangkan tingkat nasional hanya 49,665. Untuk bidang teknologi dan pertanian tingkat kota/kabupaten adalah 74,076., provinsi 62,781, sedangkan nasional 46,360. Penguasaan materi bidang pariwisata, seni dan administrasi perkantoran tingkat kota/kabupaten adalah 68,185., provinsi 59,64., sedangkan secara nasional hanya 39,0086.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rendahnya perolehan nilai ujian nasional disebabkan oleh rendahnya disiplin guru. Keadaan ini berbanding lurus dengan keadaan guru di Sumatera Utara yang belum memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugasnya. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyusun program kerja tahun 2018 bidang pembinaan dan ketenagaan yang berfungsi untuk meningkatkan kedisiplinan guru, antara lain: penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS). MGMP dan KKG adalah organisasi profesi guru non struktural yang dibentuk oleh guru dan untuk guru serta keanggotaannya secara otomatis. MGMP dan KKG ini berfungsi sebagai:

- 1) Menumbuhkan gairah dan keinginan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian di kelas.
- 2) Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menemukan cara pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.
- 3) Memberi kesempatan kepada guru untuk membagi informasi dan pengalaman dan dalam rangka penetapan kurikulum dan perkembangan IPTEK dan kebijakan pendidikan.
- 4) Memberi kesempatan kepada para guru untuk menuangkan ide-ide kreatifnya melalui program dan kegiatan KKG dan MGMP.
- 5) Membangun kerjasama dengan semua pihak untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.

Sementara itu, dari studi awal terhadap berbagai permasalahan guru dalam konteks kedisiplinan di Kota Medan, dapat dikemukakan beberapa fakta. Pertama, kurang lengkapnya perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Kedua, guru tidak rutin dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ketiga, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun. Keempat, sebagian guru menyusun perencanaan pembelajaran ketika akan disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sejalan dan dilandasi paradigma baru pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah. Sekolah sesuai dengan kondisinya, potensi siswa, dan potensi daerah dalam batas-batas tertentu di-beri keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Sekolah

diharapkan dapat melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Dari sini mereka bersama-sama dengan *stakeholdernya* dapat membuat *benchmarking* yang tidak harus sama dengan sekolah di tempat lain.

Sayangnya banyak sekolah yang tidak mampu memahami esensi kebijakan tersebut. Sekolah lebih mengharapkan pemerintah memberikan pedoman, aturan, dan petunjuk teknis yang jelas dan terinci. Sebagian besar sekolah selama ini sudah terbiasa “diatur”, sehingga ada yang gagap, malas atau kurang percaya diri ketika diberi kesempatan “mengatur” diri sendiri. Fenomena ini dapat ditemui di banyak sekolah termasuk SMK pada awal-awal pemberlakuan KTSP. Pertanyaan yang relevan dimunculkan dari kondisi tersebut adalah: Bagaimana kedisiplinan guru melaksanakan pembelajaran yang berlangsung di SMK di Kota Medan ini. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang ikut menentukan kedisiplinan guru tersebut?

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan guru sangat kompleks. *UNESCO* (1996) memandang kepala sekolah merupakan salah satu faktor strategis di dalam menentukan kemangkusannya sekolah. Hasil rekomendasinya menyatakan bahwa kepala sekolah yang baik adalah yang mampu membangun pekerjaan tim kerja yang mangkus, kompeten, dipegang oleh tenaga profesional yang memiliki kemampuan dengan mengikuti pelatihan khusus.

Terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah masih menyisakan berbagai persoalan yang cukup mendasar. Hasil investigasi Bank Dunia (*World Bank*) tahun 1998 tentang berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang mengemukakan bahwa masih belum efektifnya kepemimpinan kepala sekolah.

Hasil investigasi tersebut menemukan beberapa sebab yang membuat manajemen sekolah tidak efektif, antara lain, kepala sekolah memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sekolahnya atau dalam memutuskan pengalokasian sumber daya, kepala sekolah kurang memiliki kompetensi profesional untuk mengelola sekolah yang efektif, dan kecilnya peran masyarakat dalam membantu kelancaran pengelolaan sekolah agar efektif. Pada hal, perolehan dukungan dari masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya menjadikan sekolahnya efektif (Fasli Djalal, 2001).

Di tengah berbagai gugatan terhadap dunia pendidikan nasional, termasuk tentang kemampuan guru SMK kiranya peran sentral kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru sulit diabaikan. Secara lebih khusus, kepala sekolah sering diibaratkan sebagai ruh atau penggerak pendidikan. Pendidikan akan kehilangan arah dan tidak memiliki arti apa-apa tanpa dimotivasi oleh kepala sekolah. Di tangan kepala sekolah juga terletak maju mundurnya pendidikan, sebab kepala sekolah memiliki kewenangan yang besar untuk mendesain suatu kurikulum yang bersifat umum menjadi khusus sehingga lebih jelas dan terarah.

Pernyataan ideal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa mereka bukan hanya sebagai pelaksana pada setiap satuan dan jenjang pendidikan saja, melainkan berperan sebagai ujung tombak atas berlangsungnya pendidikan dan pengajaran sehingga proses pendidikan dan pengajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Itulah sebabnya, para penyelenggara pendidikan (dalam hal ini kepala sekolah) dituntut memiliki suatu kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, melaksanakan, mengawasi serta mengevaluasi program sekolah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Hal serupa juga dinyatakan Depdiknas (2001) yang melihat perlunya guru profesional sehingga ia mampu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dalam kelas mereka supaya kelas efektif (*effective classroom*) dan menghasilkan lulusan yang bermutu dapat dicapai di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Ini berarti bahwa kepala sekolah harus mampu mendayagunakan potensi, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai mutu lulusan yang kompetitif. Selain itu, kepala sekolah yang profesional harus mampu mengakomodasikan dan menumbuh-kembangkan budaya akademik, pendidikan dan jenjang karir guru agar mereka profesional, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan sehingga memadai. Hal ini sesuai dengan laporan Komisi Pendidikan Nasional tentang perlunya pembenahan manajemen mutu dan kepemimpinan kepala sekolah untuk mendayagunakan segenap sumberdaya pendidikan sekolah.

Dari uraian tentang fenomena dan hasil penelitian terdahulu tentang efektivitas pembelajaran di SMK dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran sangat perlu ditingkatkan pengelolaannya oleh semua elemen di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang saat ini cenderung masih lemah. Kelemahan tersebut mencakup faktor-faktor peningkatan efektivitas pembelajaran dan sekolah di bawah tanggungjawab kepemimpinan kepala sekolah, bahkan keterlibatan dunia kerja dan masyarakat dalam pendidikan.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di SMK dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan kedisiplinan guru dapat diidentifikasi beberapa faktor yang diduga memiliki hubungan positif dan signifikan. Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi mutu guru merupakan hal yang penting dilakukan

kajian secara mendalam, terutama berkaitan dengan kedisiplinan pada satuan pendidikan SMK. SMK merupakan jenjang yang menjembatani pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang lulusannya berada pada persimpangan jalan ke pendidikan tinggi atau ke dunia kerja. Sehingga kegiatan belajar yang dilaksanakan guru dan kepala sekolah di SMK harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dan minat siswa, khususnya siswa yang dipersiapkan untuk dapat bersaing secara nasional maupun global.

Implikasinya, SMK harus mampu menyediakan lingkungan dan kegiatan pembelajaran yang dapat membekali siswa sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang disyaratkan, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Tantangan ini akan menjadi ukuran bagi guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Penerapan kepemimpinan kepala sekolah, terbentuknya iklim organisasi yang baik dan tinggi motivasi altruisti guru untuk membantu siswa-siswanya dalam proses pembelajaran dapat mempercepat terwujudnya SMK yang bermutu.

Berdasarkan paparan di atas tergambar bahwa kedisiplinan guru SMK di Kota Medan perlu mendapat perhatian demi tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Terpilihnya SMK sebagai tempat penelitian, karena sorotan tentang mutu lulusannya banyak diminati berbagai pihak (*stakeholders*). Untuk itulah, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji tentang disiplin kerja guru dan factor-faktor yang mempengaruhinya dengan judul **Pengaruh Persepsi Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Organisasi, dan Altruistik terhadap Disiplin Kerja Guru Di SMK Sub Rayon 06 Kota Medan**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang terkait dengan kedisiplinan guru SMK. Beberapa kesimpulan yang dinyatakan oleh Darling-Hammond, L., LaPointe, M., Meyerson, D., Orr, M. T., & Cohen, C. (2007), *Preparing School Leaders for a Changing World: Lessons from Exemplary Leadership Development Programs* dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Program Sekolah

Kebijakan dan program sekolah merupakan aktivitas-aktivitas dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama semua warga sekolah. Kebijakan dan program sekolah yang terprogram yang baik akan menjadi ilkim sekolah yang memungkinkan terciptanya pembelajaran di SMK bermutu.

2. Pemimpin Profesional

Dalam konteks sekolah, pemimpin profesional adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang profesional dapat dibentuk dari pengalaman seseorang yang terkait dengan keprofesionalannya itu. Keprofesionalan kepala sekolah dapat dilakukan dengan menjalankan fungsi supervisi akademik kepada para guru, misalnya dalam pembimbingan penyusunan RPP dan silabus.

3. Efektivitas Sekolah

Karakteristik pendidikan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik sekolah efektif. Dalam penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), ini dianalogikan sebagai wadah atau kerangkanya, sedangkan

sekolah efektif merupakan isinya. Hal ini mencerminkan bahwa keefektifan atau mutu pendidikan harus tampak dari hasil pendidikan.

4. Kurikulum yang digunakan. Keberadaan kurikulum memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, sekaligus sebagai instrumen yang menjembatani untuk terealisasinya tujuan yang ditentukan sesuai dengan latar belakang institusi atau lembaga tersebut. Berkaitan dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi, maka secara otomatis menuntut dunia pendidikan untuk lebih fleksibel dalam menerima perubahan sesuai dengan kebutuhan pada dunia industri.
5. *Environment* (lingkungan) dan suasana kerja. Kondisi kelas tempat di mana terjadinya proses pembelajaran antara guru dan siswa harus dalam kondusif yang menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar.
6. Fasilitas dan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.
7. Kemampuan profesional, pengetahuan profesional, pengalaman dan pelatihan baik menyangkut dengan kepala sekolah maupun guru. Kemampuan dan pengetahuan profesional meliputi empat aspek kompetensi, yakni: (i) paedagogik, (ii) profesional, (iii) kepribadian, dan (iv) sosial. Kompetensi guru harus ditingkatkan secara terus menerus agar tidak ada kualifikasi yang kurang tepat, sehingga guru mampu mengajar sesuai dengan bidangnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam suatu penelitian agar diperoleh ruang lingkup penelitian yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

penafsiran yang berbeda-beda (*ambigu*) dan mungkin salah terhadap variabel-variabel yang akan diteliti.

Setidaknya ada dua alasan mengapa perlu dilakukan pengkajian terhadap faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan kemampuan guru merencanakan pembelajaran. *Pertama*, alasan pragmatis. Alasan ini terkait dengan waktu yang tersedia, tenaga dan dana yang dibutuhkan. *Kedua*, alasan akademis. Penelitian yang terkait dengan disiplin guru masih perlu dilakukan secara lebih mendalam, yakni dengan cara melibatkan faktor-faktor yang diduga berhubungan lebih banyak lagi. Dengan demikian, akan diketahui mana faktor-faktor tersebut yang paling besar memberikan sumbangannya terhadap disiplin guru, sehingga dapat dilakukan perlakuan (*threatment*) secara benar dan proporsional.

Dalam penelitian ini diteliti dibatasi pada persepsi tentang kepemimpinan kepala sekolah (X_1), iklim organisasi (X_2), dan altruistik (X_3). Sedangkan untuk variabel endogen adalah disiplin guru SMK (X_4). Penelitian dilakukan di SMK Sub Rayon 06 Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh langsung terhadap Altruistik guru SMK sub rayon 06 Kota Medan?
2. Apakah Iklim Organisasi berpengaruh langsung terhadap Altruistik guru SMK sub rayon 06 Kota Medan?
3. Apakah Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh langsung terhadap Disiplin Kerja guru SMK sub rayon 06 Kota Medan?

4. Apakah Iklim Organisasi berpengaruh langsung terhadap Disiplin Kerja guru SMK sub rayon 06 Kota Medan?
5. Apakah Altruistik berpengaruh langsung terhadap Disiplin Kerja guru SMK sub rayon 06 Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh :

1. Persepsi terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Altruistik guru SMK sub rayon 06 Kota Medan.
2. Iklim organisasi terhadap Altruistik guru SMK sub rayon 06 Kota Medan.
3. Persepsi terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap disiplin kerja guru SMK sub rayon 06 Kota Medan.
4. Iklim organisasi terhadap disiplin kerja guru SMK sub rayon 06 Kota Medan.
5. Altruistik terhadap Disiplin Kerja guru SMK sb rayon 06 Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah kejuruan (SMK). Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori tentang pembelajaran dan pengelolaan di SMK pada umumnya, maupun manfaat praktis yang berguna untuk menghasilkan lulusannya yang berkualitas.

Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Pengembangan atau penguatan teori-teori keilmuan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan ilmu manajemen dan perilaku organisasi.
2. Pengembangan teori keilmuan yang berhubungan dengan kepemimpinan, iklim organisasi, altruistik guru dan disiplin kerja.

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak, antara lain:

1. Kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinannya dalam mengelola lembaga pendidikan SMK agar iklim akademik yang diciptakan dapat memicu dan memacu disiplin guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga berimplikasi kepada mutu lulusan SMK.
2. Bagi guru dalam meningkatkan kualitas diri dengan tetap mengikuti aturan yang disepakati bersama sehingga memberi iklim organisasi di sekolah. Iklim dalam penerapan peningkatan kualitas pembelajaran.
3. Para pengambil kebijakan pendidikan (Dinas Pendidikan Kota) dalam rangka membantu mengoptimalkan peran dan fungsi kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinannya sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan pencapaian lulusan yang bermutu di SMK.
4. Peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan disiplin guru SMK dengan melibatkan lebih banyak lagi variabel-variabel prediktornya di luar prediktor yang diteliti dan sekaligus sebagai bahan bandingan untuk penelitian yang relevan di kemudian hari.